KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

***BIOGAS ECENG GONDOK:** Warga memasak menggunakan kompor biogas eceng gondok di Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (1/10/2023). Warga setempat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Ngudi Tirto Lestari mengembangkan mandiri energi biogas dari tanaman eceng gondok untuk bahan bakar kompor gas sehingga dapat mengurangi beban biaya dalam pembelian gas elpiji.*

PEMADAMAN KARHUTLA GUNUNG LAWU

Terkendala Medan Curam, Angin Kencang

SURABAYA (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menerjunkan Tim Pemadaman Jalur Darat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian membesar di Gunung Lawu, tepatnya di area Petak 40, Jatirogo, Ngawi, Jawa Timur.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto, Minggu (1/10) mengatakan, pengiriman Tim Pemadam tersebut sebagai respons cepat atas kobaran api yang makin membesar di area Petak 40. "Api kian membesar di area Petak 40, pada Jumat (29/9) malam, Sabtu (30/9) pagi Tim Pemadam berangkat," ucapnya.

Menurutnya, puluhan Tim BPBD Jatim langsung bergabung dengan Tim BPBD Kabupaten Ngawi, Tim BPBD Madiun Raya, TNI-Polri, Tim Cabdin Dishut Jatim, Tim Perhutani, KPH Lawu, LMDH, dan sejumlah relawan yang turut berjibaku melakukan penanganan kobaran api.

"Hingga Sabtu (30/9) sore, sekitar 30 hektare area lahan hutan di wilayah KPH Lawu Utara diprediksi terdampak karhutla kali ini. Dan sekitar 217 personel gabungan turut berjibaku dalam kegiatan pemadaman kobaran api," ujarnya.

Diperoleh informasi, titik api meluas ke Petak 38, 39, 40, dan 41, Lawu Utara, serta hutan lepas blok Trincing (Timur Ngudal) dengan kondisi api cukup besar dan bergerak ke Utara arah puncak.

Gatot menjelaskan, upaya pemadaman api karhutla Gunung Lawu kali ini terkendala medan yang curam, angin yang kencang dan sarana prasarana yang terbatas. "Sebagai upaya menghambat laju api, Tim Gabungan Pemadaman Jalur Darat telah membuat ilaran untuk menyekat laju api agar tidak meluas. Sebab, kobaran api karhutla saat ini telah mengarah pada Petak 49, yang masuk wilayah Magetan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Gatot, sebagai langkah antisipasi dan percepatan, dirinya telah berkoordinasi dengan Tim BNPB untuk penanganan karhutla melalui jalur udara atau water bombing. "Saat ini kami terus melakukan pemantauan perkembangan di lokasi. Apakah perlu penanganan dengan water bombing atau cukup melalui jalur darat," kata Gatot. **(Ant/San)-f**

MA PERINTAHKAN KPU CABUT ATURAN

Eks Napi Korupsi Kembali 'Nyaleg'

JAKARTA (KR) - Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut dua aturan yang dinilai mempermudah mantan narapidana (napi) kasus korupsi kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Hal tersebut berdasarkan dikabulkannya uji materi oleh MA atas Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2023 yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta dua eks pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Abraham Samad.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU No 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon," demikian bunyi keterangan tertulis MA, Sabtu (30/9).

Dua ketentuan tersebut dipersoalkan karena dinilai membuka pintu bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai caleg tanpa menunggu masa jeda selama lima tahun yang telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan itu, MA pun menyatakan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juncto Putusan MK No 87/PUU-XX/2022.

Sementara, Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023. MA menyatakan kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pertimbangan hukum, MA menilai perlu ada syarat ketat dalam menyaring para calon wakil rakyat demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para wakil rakyat yang terpilih dari hasil pemilu.

MA menyebut tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa, sehingga tidak adanya persyaratan ketat dipandang bakal mengakibatkan proses pembangunan yang terhambat. **(Ant/Obi)-**

KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG

Kemenhub Terbitkan Izin 'Whoosh'

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diberi nama 'Whoosh'. Izin operasi tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC).

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan keluarnya izin operasi tersebut, KCJB telah memenuhi aspek kelaikan operasional kereta cepat. "Alhamdulillah, seluruh komponen pengujian dan sertifikasi telah dilaksanakan sehingga surat izin operasi ini dapat diterbitkan dan operasi komersial KCJB dapat segera dilakukan," ucap Menhub di Jakarta, Minggu (1/10).

Menhub menjelaskan, operasional KCJB dilakukan secara bertahap untuk terus dievaluasi sampai skenario ultimate hingga 68 perjalanan perhari. Selain itu, untuk mempermudah penumpang mencapai Kota Bandung, telah disiapkan juga KA feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung. **(Ant/San)-f**

LEBIH DARI 60 HARI TANPA HUJAN

44% Wilayah Jateng Kekeringan Ekstrem

CILACAP (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, berdasarkan analisis curah hujan di seluruh wilayah Jawa Tengah pada Dasarian (10 hari) Ketiga bulan September 2023 masih termasuk kategori rendah atau 0-50 milimeter perdasarian.

"Hal itu diketahui berdasarkan hasil analisis yang dirilis BMKG Stasiun Klimatologi (Staklim) Jawa Tengah hari ini," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Minggu (1/10).

Sementara dari hasil pemantauan hari tanpa hujan (HTH) yang dilakukan Staklim Jawa Tengah pada Dasarian Ketiga September, kata Teguh, diketahui 44 persen wilayah Jateng masuk kriteria kekeringan ekstrem karena lebih dari 60 hari tanpa hujan.

Selanjutnya, 15 persen wilayah Jateng masuk kriteria kekeringan sangat panjang (31-60 hari tanpa hujan), 1,4 persen masuk kriteria panjang (21-30 hari tanpa hujan), 33 persen masuk kriteria menengah (11-20 hari tanpa hujan), 0,6 persen masuk kriteria pendek (6-10 hari tanpa hujan), dan 6,1 persen masuk kriteria sangat pendek (1-5 hari tanpa hujan).

"Prakiraan probabilistik curah hujan pada Dasarian Pertama Oktober, peluang lebih dari 90 persen curah hujan rendah atau kurang dari 50 milimeter perdasarian di seluruh wilayah Jawa Tengah," jelasnya.

Terkait prakiraan deterministik curah hujan pada Dasarian Pertama Oktober hingga Dasarian Pertama November, Teguh mengatakan, pada Dasarian Pertama dan Kedua Oktober, curah hujan di seluruh wilayah Jateng diprakirakan masuk kriteria rendah (0-50 milimeter).

Menurut Teguh, curah hujan kriteria rendah juga diprakirakan masih berlangsung di seluruh wilayah Jateng pada Dasarian Ketiga Oktober, kecuali sebagian kecil wilayah Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, dan Kebumen yang masuk dalam kriteria menengah (51-75 milimeter).

Selanjutnya pada Dasarian Pertama November, kata Teguh, seluruh wilayah Jateng masuk dalam kriteria rendah (0-50 milimeter), kecuali wilayah Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, sebagian Kebumen, Pekalongan, sebagian kecil Banyumas, Purworejo, Pemalang, Batang, Kendal, Temanggung, Magelang, dan Karanganyar yang masuk dalam kriteria menengah (51-100 milimeter).

"Berdasarkan analisis hari tanpa hujan dan curah hujan pada Dasarian Ketiga September serta prakiraan curah hujan probabilistik pada Dasarian Pertama dan Kedua Oktober, BMKG Staklim Jateng mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di Jateng untuk periode 1-10 Oktober 2023," kata Teguh. **(Ant/San)-f**

PERMALUKAN MADURA UNITED FC

Borneo FC Ambil Alih Puncak Klasemen

PAMEKASAN (KR) - Borneo FC mengambil alih posisi puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2023/2024 menyusul kesuksesan yang mereka raih di pekan ke 14, Minggu (1/10). Pesut Etam secara mengejutkan mempermalukan Madura United FC.

Dalam duel di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan tersebut, tim tamu menang dengan skor 2-1. Borneo FC naik ke puncak klasemen dengan 28 poin, sedang Madura United FC turun satu peringkat ke posisi dua dengan 27 poin.

Tuan tumah, tampil berani dan melakukan tekanan sejak awal laga. Fransisco Rivera membuat peluang tapi sepakannya melambung. Borneo FC mencoba keluar dari tekanan. Stefano Lilipaly, hampir membawa Borneo FC unggul tapi tendangannya bisa ditepis Wawan.

Borneo FC akhirnya unggul pada menit ke 29. Berawal dari serangan cepat, Stefano Lilipaly memberikan umpan pada Terens Puhiri. Sepakan Terens Puhiri sempat ditepis Wawan namun bola tetap meluncur masuk ke jala Madura United FC.

Laskar Sape Kerab merespons dengan cepat. Hanya berselang 11 menit, tuan rumah menyamakan kedudukan. Salim Tuharea mencetak gol setelah mendapatkan bola liar di depan gawang Borneo FC. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, pertandingan berlangsung alot. Nadeo membuat penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan Malik Risaldi. Gantian, Borneo FC membuat peluang dengan tendangan Diego Michels, tapi masih mudah diamankan Wawan.

Borneo FC mencetak gol kemenangan di menit 85. Berawal dari kesalahan Wawan Hendrawan yang tak bisa menangkap sundulan dari Fachrudin Aryanto. Bola liar dimanfaatkan Lilipaly untuk membawa timnya unggul 2-1. **(Yud)-f**

AJANG BUMD AWARD 2023

BPD DIY Raih Peringkat 1 Penghargaan BPD Kategori Sedang

KR-Istimewa

Dirut Bank BPD DIY berfoto dengan penghargaan BUMD Award 2023.

JAKARTA (KR) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan BUMD Awards 2023 dan Rapat Koordinasi Seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola yang kompetitif antar-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan tajuk 'Peran BUMD dalam Peningkatan Pelayanan Publik, Penanganan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi'. Dalam ajang cukup bergengsi Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY berhasil menerima penghargaan BPD Peringkat 1 Kategori Sedang.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro kepada Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Ketika dimintai komentar soal penghargaan yang diraih oleh Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengaku bangga atas penghargaan yang sudah diterima. Oleh karena itu sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur Bank BPD DIY akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan akan terus berupaya mendorong kemajuan perekonomian daerah.

"Kami bersyukur atas diraihnya penghargaan ini. Dengan adanya penghargaan ini bukan berarti kami akan berpuas diri. Sebaliknya kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi," ucapnya. "Penghargaan ini semakin memotivasi BPD DIY untuk bekerja lebih maksimal lagi, dan meningkatkan pelayanannya. Sehingga kehadiran BPD DIY bisa semakin dirasakan kemanfaatannya,"kata Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad di Yogyakarta, Sabtu (30/9).

Menurutnya, keberadaan BUMD memiliki peranan penting dalam mendorong kemakmuran bagi daerah. Seperti berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen dan juga pajak. Peranan BUMD terhadap daerah bisa diukur melalui kontribusi nilai tambahnya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta terciptanya lapangan kerja.

"Peran BUMD pada kemajuan perekonomian daerah ini perlu mendapatkan apresiasi nyata melalui 'Penghargaan BUMD Terbaik Tahun 2023'. Sehingga tercipta iklim kompetitif dan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja serta pengelolaan BUMD," ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menyatakan BUMD seharusnya untung. Namun dalam perjalanannya ada yang untung dan ada yang belum. Dari 1.000-an BUMD, yang masih belum untung ada 300-an BUMD, artinya masih lebih banyak yang untung. Oleh karena itu BUMD ini harus terus dikembangkan.

Bagi BUMD yang belum untung perlu diperbaiki tata kelolanya. Intinya ada dua persoalan yang dihadapi, pertama kurang modal, dan kedua terkait dengan management. Pembenahan harus terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Keuntungannya BUMD laba seluruh Indonesia hampir Rp 30 triliun, dividennya Rp13,02 triliun, balik ke kas daerah dan lainnya. BUMD di bawah pengawasan daerah lebih banyak yang untung," imbuhnya.

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, tujuan utama BUMD Awards adalah memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD seluruh Indonesia.

"BUMD seluruh Indonesia saat ini ada 1.056. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja dari BUMD, dan juga dalam rangka pembinaan dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD,"tambahnya. **(Ria)**